

**SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN
SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh:

TEGAR SAKTI PRAMANA PETISA

NIT. 20293425

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Village Treasury Land (TKD) is an area of land whose management and development are owned by the village government. TKD is one of the assets owned by the village to carry out development in the area. The village government can manage TKD either by itself or through other parties, such as self-cultivation, leasing, land use cooperation, and build-operate-transfer or build-transfer-operate schemes. Continuous use of TKD without considering environmental factors can also turn the land into critical land that eventually needs to be rehabilitated to function optimally again.

This research takes place in Kalurahan Sumberarum, which shows that the utilization of TKD has not yet reached its optimal potential. This research method uses a qualitative method with a descriptive normative approach.

The results show that the TKD management system regulation implemented by the kalurahan government is in accordance with applicable regulations. The implementation of the management system has been running, reflecting agrarian characteristics as agricultural land. The Sumberarum Kalurahan Government actively manages TKD to generate economic income that contributes to Village Original Income (PADes) through leasing.

Keywords: Village Treasury Land; Land Utilization and Land Use; Regulation; Stakeholders.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoretis.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pertanyaan Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Format Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Teknik Pengambilan Data dan Narasumber	36
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	37

E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Kondisi Geografis dan Administratif Kalurahan Sumberarum	45
B. Potensi Wilayah di Kalurahan Sumberarum.....	48
BAB V SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA.....	55
A. Regulasi Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Sumberarum	55
B. Implementasi Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Sumberarum	59
C. Permasalahan/kendala dan Penerapan Solusi Terkait Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Sumberarum	63
D. Dampak Ekonomi dari Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Sumberarum	68
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan ruang lingkup wilayah administrasi yang mendapatkan hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Ini merupakan bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) yang diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat melalui program-program yang relevan dengan pengembangan wilayah tersebut (Sekarningrum, 2019; Dwi Rahmawan, dan Mujiburohman, 2023).

Pemerintah desa harus menjamin legalitas perlindungan terhadap warga desanya melalui pelayanan administrasi pemerintahan desa, salah satunya penting dalam melakukan tertib administrasi pertanahan desa untuk mencegah sengketa/konflik pertanahan (Handayani dkk., 2023). Pemerintah desa dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan membutuhkan sumber dana karena hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran keberlangsungan pemerintahan itu sendiri (Gunawan dan Karina, 2023). Salah satu sumber dana tersebut dapat berasal dari tanah desa yang salah satu bentuknya berupa Tanah Kas Desa (TKD).

Menurut Tilman, Aries Mujiburohman, dan Dewi (2021) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keistimewaan dalam melakukan kegiatan pemerintahan, salah satunya pada bidang pertanahan. Urusan pertanahan di Provinsi DIY dapat dibagi berdasarkan tiga jenis tanah meliputi tanah hak, tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten. Tanah hak adalah tanah yang dapat dimiliki masyarakat Indonesia sesuai yang dimaksud pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sedangkan terkait tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tercantum di dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 32, yakni terdapat penjelasan bahwa Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah *keprabon* dan tanah bukan *keprabon* yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di atas lebih rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, yaitu pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa tanah bukan *keprabon* atau *dede keprabon* terdiri dari: a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh*; b. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki *Serat Kekancingan*; c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki *Serat Kekancingan*; dan d. tanah yang belum digunakan.

Tanah desa dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pada Pasal 1 angka 1, yaitu tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, *Pelungguh*, *Pengarem-Arem*, dan tanah untuk kepentingan umum. Hak *Anggaduh* merupakan hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten dengan tujuan mengelola dan memungut/mengambil hasil dan manfaat dari tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) atau tanah Kadipaten (*Paku Alaman Ground*) terhadap tanah bukan *keprabon* atau *dede keprabon* kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dalam jangka waktu selama dipergunakannya tanah tersebut (Bimasena, 2020).

Tanah desa merupakan salah satu modal berharga yang dimiliki oleh pemerintah desa, pengelolaan yang optimal oleh pemerintah desa tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Keberadaan tanah desa jika tidak dioptimalkan justru mengakibatkan beban untuk anggaran belanja desa sebab pemerintah desa tetap memiliki kewajiban untuk mengalokasikan belanja pemeliharaan tanah desa maupun

membayar pajak tanah tersebut (Fauzan dan Winarni, 2020; Sinaga dan Rini, 2022). Nilai pemasukan keuangan yang diperoleh dari tanah desa bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan keuntungan yang konstan dan signifikan bagi pemerintah desa saat dilakukan pengelolaan secara optimal (Maryam dan Adrianis, 2021).

Tanah Kas Desa atau TKD merupakan bidang tanah yang pengelolaan dan pengembangannya dimiliki oleh pemerintah desa, TKD merupakan salah satu modal yang dimiliki desa untuk melakukan pembangunan pada wilayah tersebut. TKD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai sumber penghasilan utama desa yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pengembangan desa sebagai bentuk implementasi tugas pemerintah desa dalam memajukan kemakmuran masyarakatnya (Sekarningrum, 2019). Sistem pengalokasian dan pengelolaan dalam rangka memaksimalkan potensi dari TKD tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (Ambarwati dkk., 2020). Hal ini untuk mewujudkan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa yang signifikan dan dapat dirasakan dalam skala yang lebih luas.

Pemanfaatan tanah kas desa (tanah *bengkok*) dapat berupa fasilitas umum yang menunjang kegiatan masyarakat seperti lapangan, posyandu, sekolah, atau sarana dan prasarana sosial lainnya. Selain itu juga, tanah *bengkok* dapat bermanfaat sebagai sumber penghasilan desa jika dikembangkan menjadi kawasan rekreasi dan wisata yang tentunya terdaftar sebagai aset kekayaan milik desa tersebut (Basri dkk., 2020). TKD yang dikelola oleh pemerintah desa, banyak yang dimanfaatkan sebagai tanah sawah dengan cara disewakan dan atau dikerjasamakan dengan melakukan metode bagi hasil dengan masyarakat terutama pada sektor pengembangan pertanian. Akan tetapi, dalam praktiknya pemanfaatan TKD belum dapat dioptimalkan secara baik dari segi aspek operasional maupun hasil dari pertaniannya (Suparlan, Sugiyanto, dan Jati, 2024).

Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan TKD dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak lain, seperti dilakukan penggarapan sendiri, sewa-menyewa, melakukan kerja sama penggunaan tanah, dan bangun guna serah atau bangun serah guna (Syarifah dan Handayani, 2023). Pengelolaan TKD tersebut harus dilakukan sesuai dengan suatu sistem pengelolaan TKD yang telah dimiliki oleh setiap desa agar mencegah terjadinya penyelewengan dan perubahan fungsi TKD yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan ketidakmampuan sistem pengelolaan yang ada untuk memberikan kepastian hukum yang memadai. Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi keberadaan TKD sering kali tidak dapat memastikan tanah tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Penggunaan TKD secara berkelanjutan tanpa memperhatikan faktor lingkungan juga dapat mengubah tanah tersebut menjadi lahan kritis yang pada akhirnya perlu direhabilitasi agar dapat berfungsi secara optimal kembali. Dengan demikian, hal ini tentu akan berdampak kepada berbagai sistem tata kelola yang berakibat pada keberlangsungan manfaat tanah tersebut yang berujung kepada pengabaian lahan dan degradasi lahan (Fauziah dkk., 2021). TKD yang telah mengalami perubahan peruntukannya, sebaiknya dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya lahan tersebut digunakan dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan dan kemanfaatan utama tanah tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman yang menunjukkan bahwa pemanfaatan TKD yang dilakukan belum mencapai potensi optimalnya, meskipun lokasi TKD tersebut tergolong strategis. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki TKD dengan realisasi pemanfaatannya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan TKD. Lokasi strategis TKD dapat dilihat melalui adanya aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi, atau potensi pengembangan infrastruktur yang ada,

seharusnya hal ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemanfaatan TKD. Namun, berbagai faktor seperti keterbatasan informasi, kurangnya inovasi, atau kendala regulasi dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan tersebut.

Pengoptimalan dalam pengelolaan TKD di lokasi strategis, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan TKD di Kalurahan Sumberarum, diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi pengelolaan TKD yang optimal dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan potensi lokasi strategis dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan TKD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai wujud amanah dari berlakunya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Sistem pengelolaan salah satu sumber daya (aset) desa berupa tanah kas desa yang diperoleh pemerintah desa melalui kewenangan otonomi daerah tersebut, tentunya memiliki dampak pada pengaturan kegiatan pemerintah desa yang berpengaruh pada keadaan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Sistem pengelolaan TKD harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah desa yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pengelolaan terhadap TKD tersebut, perlu melakukan pengoptimalan dan pengembangan TKD yang dilandasi dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sistem pengelolaan TKD yang tidak dikembangkan dan dioptimalkan justru berdampak terhadap tidak maksimalnya pemanfaatan TKD baik dari segi aspek

operasional maupun hasil yang dapat diperoleh dari keberadaan TKD tersebut.

Hasil yang didapatkan dari pemanfaatan TKD merupakan sumber modal bagi pemerintah desa untuk melakukan pengembangan desa secara berkelanjutan. Akan tetapi, pada praktiknya banyak pemanfaatan TKD yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa memperhatikan faktor lingkungan serta jika terus menerus dilakukan akan dapat berdampak terhadap perubahan tanah menjadi lahan kritis dan berakhir pada penurunan fungsi tanah. Hal ini tentu berdampak terhadap kondisi ekonomi desa dan para pemangku kepentingan yang terjun langsung dalam pemanfaatan TKD serta kesejahteraan masyarakat sekitar yang ikut merasakan dampak keberadaan TKD tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini mengarah kepada regulasi dari sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah kalurahan terkait TKD dan implementasi sistem pengelolaan TKD yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan TKD di Kalurahan Sumberarum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terdiri atas tiga poin utama, yaitu:

1. Mengetahui regulasi yang diterapkan Pemerintah Kalurahan Sumberarum dalam melaksanakan sistem pengelolaan TKD;
2. Mengetahui implementasi sistem pengelolaan TKD, permasalahan/kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Sumberarum dalam melakukan pengelolaan TKD, dan solusi yang telah dilakukan dalam menangani hal tersebut;
3. Mengetahui dampak ekonomi yang dialami oleh pemerintah kalurahan dalam memanfaatkan TKD di Kalurahan Sumberarum.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian mencakup tiga poin utama, yaitu:

1. Manfaat ilmiah/akademis untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan aset pemerintah berupa TKD yang dilakukan pemerintah kalurahan sebagai wujud penerapan dan terlaksananya dari UUK DIY;
2. Manfaat sosial untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, aparat pemerintah setempat, dan pihak lainnya tentang sistem pengelolaan TKD yang jika dilakukan secara optimal dapat berpengaruh pada keadaan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Manfaat praktis untuk mengetahui manfaat-manfaat dari pengembangan TKD yang dapat dijadikan titik terang dilakukannya kolaborasi oleh para pemangku kepentingan beserta badan usaha, pihak swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan TKD dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sumberarum telah dibuat dan diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penerapan sistem pengelolaan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kalurahan Sumberarum. Hal ini dilakukan agar tata kelola terkait tanah kas desa dapat berjalan dengan lancar, meminimalkan timbulnya permasalahan, dan pengambilan solusi yang lebih relevan terkait permasalahan yang terjadi. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pemerintah kalurahan merupakan salah satu wujud kontribusi bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini telah menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pemerintah kalurahan menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penerapan dari regulasi tersebut juga telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kalurahan Sumberarum sebagai acuan melalui pembuatan Peraturan Desa Sumberarum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sumberarum. Penyesuaian yang dilakukan tersebut berupa adanya prosedur permohonan dalam pengelolaan tanah kas desa seperti penunjukan lokasi tanah kas desa yang akan dimanfaatkan, adanya penentuan harga sewa dalam memanfaatkan tanah kas desa dengan musyawarah mufakat bersama pihak calon pengelolaan tanah kas desa, dan juga penerbitan surat perjanjian terkait sistem pembayaran sewa maupun pemberian hasil pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pada setiap tahunnya agar memudahkan pelaporan tertulis dalam pembukuan pengelolaan kas kalurahan;
2. Implementasi dari sistem pengelolaan tanah kas desa telah berjalan mencerminkan karakteristik agraris dari Kalurahan Sumberarum dengan

dominasi pengelolaan tanah sebagai lahan pertanian, yang ditunjukkan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani melalui penggunaan tanah kas desa secara bagi hasil atau sewa-menyewa. Permasalahan/kendala yang terjadi dalam pengelolaan tanah kas desa berupa adanya keterlambatan pembayaran sewa atau bagi hasil, terdapat penguasaan tanah tanpa hak setelah berakhirnya masa sewa, dan penyelewengan pengelolaan berupa adanya perjanjian yang dilakukan pihak penyewa di luar kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya. Penerapan solusi dalam menangani berbagai permasalahan terkait pengelolaan tanah kas desa yang telah diterapkan berupa penyuratan, mediasi dan negosiasi, sampai menjatuhkan sanksi dengan adanya pembatalan perjanjian melalui pencabutan izin pemanfaatan tanah kas desa;

3. Pemerintah Kalurahan Sumberarum secara aktif mengelola tanah kas desa untuk menghasilkan pendapatan ekonomi yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sewa-menyewa kepada masyarakat untuk dilakukan pengelolaan, baik sebagai tanah pertanian maupun non pertanian. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pemerintah kalurahan hanya memberikan kontribusi sebesar 51,28% terhadap total PADes, hal ini belum mencapai target dan masih diperlukan pengelolaan lebih terhadap tanah kas desa untuk mencapai target kenaikan sebesar 20,64% terhadap PADes agar tercapainya target pengelolaan terhadap tanah kas desa tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumberarum.

B. Saran

1. Pemerintah kalurahan dapat melakukan penguatan regulasi terkait pemanfaatan tanah kas desa, termasuk penetapan sanksi yang tegas bagi pelanggar;
2. Pemerintah kalurahan sebaiknya segera melakukan pengembangan pada BUMDes, yang dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan

ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing;

3. Peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu dilakukan pemerintah kalurahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar sewa dan hasil pemanfaatan tanah kas desa tepat waktu;
4. Pemerintah kalurahan dapat meningkatkan pengelolaan tanah kas desa, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau, dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan untuk memaksimalkan pengelolaan terhadap tanah kas desa oleh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan PADes;
5. Pemerintah kalurahan dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau organisasi non pemerintah, untuk membantu dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan tanah kas desa agar lebih terkontrol;
6. Pemerintah kalurahan bersama masyarakat dapat melakukan kolaborasi pengembangan potensi wisata alam dan pertanian di atas tanah kas desa, seperti berkebun, *outbound*, atau pengamatan satwa, dengan berkolaborasi bersama masyarakat untuk meningkatkan PADes dan memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (2019) 'Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Bengkulu oleh Mantan Kepala Desa X di Kecamatan Gunung Jati', *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 1(2), pp. 59–69. doi:<https://doi.org/10.46799/jequi.v1i1>.
- Abrianto, B.O. and Fikri, M.A. (2021) 'Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan', *Pandecta*, 16(2), pp. 205–217. doi:[10.15294/pandecta.v16i2.28208](https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.28208).
- Akhmadiyah, Z. and Herzfeld, T. (2021) 'How does practice matches land laws in Central Asia?', *Land Use Policy*, 109, pp. 1–12. doi:[10.1016/j.landusepol.2021.105726](https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105726).
- Ambarwati, A. *et al.* (2020) 'Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kelompok Miskin Marginal: Hasil Penelitian Aksi di Kebumen', *Jurnal Analisis Sosial*, 24(1), pp. 130–167.
- Andani, I. and Amin, M.J. (2022) 'Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020)', *Pemerintahan Integratif*, 8(4), pp. 1189–1199.
- Andriyani, S., Rahman, A. and Wahyuningsih, W. (2023) 'Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga di Kawasan Mandalika (Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), pp. 236–252. doi:[10.29303/jkh.v8i2.157](https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.157).
- Apriani, R. and Asmar, Abd.R. (2022) 'Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan

- Pengadilan Tata Usaha Negara’, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(1), pp. 95–101. doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16747>.
- Arief, R., Widjayanto, J. and Priyanto (2021) ‘Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pertahanan dalam Konsep Pertahanan Pulau-pulau Besar (Studi TNI-AL)’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), pp. 1589–1604. doi:10.47492/jip.v2i5.942.
- Arnowo, H. (2022) ‘Peran Bank Tanah dalam Pengaturan Penyediaan Tanah’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), pp. 3077–3088. doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1277>.
- Arnowo, H. (2023) ‘Determinants of Land Technical Considerations in Land Control’, *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(2), pp. 119–130. doi:10.31292/mj.
- Asmiana, N. and Susiani (2023) ‘Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong’, *JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis)*, 6(3), pp. 455–467. Available at: [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman (2023) *Kecamatan Moyudan Dalam Angka 2023*.
- Bari, M. (2023) ‘Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Land Rights sebagai Hak Asasi Manusia’, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), pp. 37–55. doi:10.23920/litra.v3i1.1478.
- Basri *et al.* (2020) ‘Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Potensi Kelompok Tanaman Hias di Wilayah Kedungsari Kabupaten Magelang’, *University Research Colloquium*, pp. 117–120.

Bimasena, A.N. (2020) *Analisis Eko-Spasial Pemanfaatan 'Tanah Desa' di Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Institut Teknologi Yogyakarta.

Bimasena, A.N. (2021) 'Analisis SWOT-AHP untuk Arah Jenis Pemanfaatan Tanah Desa', *Prosiding FIT ISI*, 1, pp. 153–157.

Cahyana, I.N. (2019) 'Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan Upaya Perlindungan Hukumnya bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum', *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5550>.

Chairil, A. *et al.* (2021) 'Impact of Land Use Change on Hydrological Conditions in the Karajae Watershed, South Sulawesi Province', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing Ltd, pp. 1–15. doi:10.1088/1755-1315/886/1/012079.

Chavan, Dr.V.K. and Patil, P.K. (2024) 'A Study of Agriculture Land Use Efficiency of Dhule District: A Geographical Analysis', *International Journal of Geography, Geology and Environment*, 6(1), pp. 170–173. doi:10.22271/27067483.2024.v6.i1c.217.

Choirunnisa, F., Zamzami, A. and Anadi, Y.R. (2024) 'Implikasi Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Tirtomoyo (Studi di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang)', *DINAMIKA*, 30(1), pp. 9091–9105.

Daerah Istimewa Yogyakarta (2017) *Laporan Kegiatan Distribusi Tanah Desa*.

- Damopolii, A., Najohan, H. and Sumampow, I. (2022) 'Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan', *EKSEKUTIF*, 2(1), pp. 1–14.
- Dax, T. *et al.* (2021) 'Land Abandonment in Mountain Areas of the EU: An Inevitable Side Effect of Farming Modernization and Neglected Threat to Sustainable Land Use', *Land*, 10(6). doi:10.3390/land10060591.
- Dwi Rahmawan, T. and Mujiburohman, D.A. (2023) 'Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta', *Abdimasku*, 6(2), pp. 349–358.
- Fauzan, N.A. and Winarni, F. (2020) 'Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)', *Journal of Public Policy and Administration Research*, 5(2).
- Fauziah, E. *et al.* (2021) 'Management of Village Treasury Land Based on Bamboo Agroforestry', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing Ltd. doi:10.1088/1755-1315/940/1/012007.
- Fitria, M.Z. and Fahrullah, A. (2023) 'Penerapan Sewa Tanah Kas Desa untuk Lahan Pertanian dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), pp. 96–110. doi:https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.7792.
- Fitriani, L. and Oktafia, R. (2021) 'Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), pp. 1617–1628. doi:10.29040/jiei.v7i3.3583.

- Ghalib, A. and Yasin, B. (2023) 'Tindakan Hukum Pemerintah Desa terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat yang Tidak Memiliki Hak', *Justitiable*, 5(2).
- Gunawan, M.S. and Karina, S. (2023) 'Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa', *UNES LAW REVIEW*, 6(2), pp. 6113–6126. doi:10.31933/unesrev.v6i1.
- Handayani, S.W. *et al.* (2023) 'Village Land Administration as an Effort to Prevent Agrarian Disputes/Conflicts', *Kosmik Hukum*, 23(1), p. 1. doi:10.30595/kosmikhukum.v23i1.15651.
- Herlina and Maulana, A.F. (2024) 'Analisa Hukum Pertanahan Mengenai Sengketa Tanah Bank', *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(1), pp. 1–8. doi:10.47709/jhb.v13i01.3511.
- Illiyan, M. (2020) 'Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), pp. 367–379. doi:10.14203/jmb.v22i3.1106.
- Jayawarsa, A.A.K., Purnami, A.A.S. and Saputra, K.A.K. (2021) 'Meaning the Economic Existence and Financial Management of the Small Organization of a Traditional Village in Bali', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(5), pp. 8–15.
- Jayawarsa, A.A.K., Saputra, K.A.K. and Purnami, A.A.S. (2021) 'Is it Important to Manage and Identify Village Wealth as a First Step to Becoming a Village Sustainability?', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(6), pp. 39–44. Available at: www.sustainable.org.

- Junizar and Miswaruddin, H. (2024) 'Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat', *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), pp. 73–83. doi:<https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1.7319>.
- Krismantoro, D. and Supriyanto, V.H. (2021) 'Village Treasury Land Legal Status after the Implementation of Law Number 13 of 2012 Concerning Special Region of Yogyakarta Privileges (UUK DIY)', *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 6(2), pp. 414–424. Available at: <http://journalppw.com>.
- Kurniawan, A.F., Suharto, E. and Andari, D.W.T. (2023) 'Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum', *Tunas Agraria*, 6(3), pp. 204–219. doi:10.31292/jta.v6i3.245.
- Lenaini, I. (2021) 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling', *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), pp. 33–39. doi:10.31764/historis.vXiY.4075.
- Lusiani, T. and Hafizh, M.A. (2022) 'Purwarupa Desain Sistem Administrasi Pengelolaan Tanah untuk Kelurahan di Kota Jakarta', *Jurnal Riset Jakarta*, 14(2), pp. 69–76. doi:10.37439/jurnaldrd.v14i2.56.
- Lutfi, W. (2021) 'Kajian Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4), pp. 1–17.
- Maryam, S. and Adrianis, M. (2021) 'Strategi Pemerintahan Desa dalam Mengelola Sawah Tanah Kas Desa di Desa Seling Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin’, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3, p. 52.
Available at: <https://jppd.org/index.php/jppd>.

Masrich, A., Muhammad, A.S. and Suswaini, E. (2024) ‘Optimizing the Utilization of Village Land in Maintaining the Sustainability of Melikan Village Government’, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 40(1), pp. 1–8. doi:10.29313/mimbar.v40i1.2073.

Miswar, D., Sugiyanta, I.G. and Yarmaidi (2020) ‘Geographical Study of Regional Potential Geospatial Based on Pringsewu District’, *LA GEOGRAFIA*, 18(3), pp. 255–268. doi:10.35580/lageografia.v18i3.13609.

Mulyana, Y. and Oktavian, T.M. (2022) ‘Penyuluhan tentang Eksistensi dan Fungsi Tanah Carik yang Dialihfungsikan Tanpa Hak di Kabupaten Garut’, *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), pp. 437–450.

Musthofa, R.Z. and Aminah, S. (2021) ‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa’, *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), pp. 41–62. doi:10.55352/maqashid.v1i1.172.

Muttaqin, A. and Mustafida, L. (2021) ‘Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Kelurahan Condongcatur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Taman Kuliner Condongcatur)’, *Fortiori Law Journal*, 1(1), pp. 58–87. Available at: <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/921>.

Naseem, S., Mohsin, M. and Zhao, X. (2023) ‘The Influence of Land Utilization and Urbanization, on Environmental Decay in G-20 Countries: Novel Implications for Sustainable Urban Growth the Influence of Land

Utilization and Urbanization, on Environmental Decay in G-20 Countries: Novel Implications for Sustainable Urban Growth-54', *Acta Polytechnica Hungarica*, 20(10), pp. 53–72.

Noer, Z. and Muchyidin (2020) 'Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa', pp. 1–11.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan Tahun 2012 (2012).

Pamungkas, L.T., DJ, E.W. and Widiyahseno, B. (2022) 'Pengelolaan Aset Desa sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo', *VILLAGE : Journal Rural Development And Government Studies*, 1(1). Available at: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/village/article/view/5863>.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041 (2021).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (2017).

Peraturan Desa Sumberarum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sumberarum (2020).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (2017).

Peraturan Kalurahan Sumberarum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (2024).

Peraturan Kalurahan Sumberarum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2027 (2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (2016).

Piddubnyi, O.Y. *et al.* (2021) ‘Legislative Support for Expanding the Land Powers of Local Self-Government Bodies in Ukraine’, *International Journal of Agricultural Extension*, 9(Special Issue), pp. 55–63. doi:10.33687/ijae.009.00.3721.

Prasad, A.S., Ramamurthy, C. and Krishna, K.L. (2022) ‘Land Use and Land Cover Change and Sustainability Assessment of Vijayawada City by RS&GIS’, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing Ltd, pp. 1–7. doi:10.1088/1755-1315/982/1/012033.

Prianto, Y. *et al.* (2021) ‘Telaah Sosiologis Penyebab Pelanggaran Penguasaan Tanah di Lingkungan Pesisir di Kabupaten Lampung Selatan’, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(2), pp. 369–376. doi:10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.

Purnama, W.W. (2021) ‘Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah Tanpa Izin’, *Jurnal Serambi Hukum*, 14(2), pp. 42–48. doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921>.

Purnomo, H. (2022) ‘Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten

Pakualaman (Recognition of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and Land Rights Owned by Kadipaten Pakualaman)', *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 1(1), pp. 71–92. doi:<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.17>.

Putri, D.N. (2020) 'Public Perceptions of the Quality of Public Services at the Sumberduren Village Office, Tarokan District, Kediri Regency', *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(2), pp. 108–126. doi:<https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36118>.

Putwi, N.S. and Nurhadi (2021) 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul', *Jurnal Enersia Publika*, 5(2), pp. 474–489. doi:<https://doi.org/10.30588/jep.v5i2.957>.

Rachman, M., Santoso, M.A. and Desril, R. (2024) 'Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-undang Cipta Kerja serta Implikasinya terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), pp. 8413–8426. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10187>.

Raharjo, T. *et al.* (2021) 'Innovations of Village Asset Management: A Case of the Best Indonesian Village', *Journal of the Malaysian Institute of Planners*, 19(3), pp. 449–459. doi:<https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.1021>.

Rahmadhan, M.I.W., Saputra, R.J. and Mubarok, A. (2024) 'Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria', *Notary Law Jurnal*, 3(1), pp. 101–114. doi:<https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i2.84>.

- Redin (2022) ‘Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)’, *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), pp. 1–13. doi:<https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.687>.
- Resmana, P.F. and Fauziyah (2023) ‘Kewenangan Kepala Desa dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa di Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang’, *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 2(5), pp. 398–405. Available at: <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.
- Rifki, M. *et al.* (2024) ‘Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Industri Leasing di Indonesia’, *Journal of Management and Creative Business*, 2(3), pp. 294–300. doi:[10.30640/jmcbus.v2i3.2909](https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i3.2909).
- Rizhaldi, M.B. and Susilowati, I.F. (2023) ‘Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah setelah Berlakunya UU No.13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional’, *NOVUM: JURNAL HUKUM*, (In Press-Syarat SPK (15)), pp. 148–162. doi:<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50695>.
- Rusmayadi, G. *et al.* (2024) ‘Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Pangan’, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), pp. 9488–9495. doi:<https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31300>.
- Sam, I.M., Setiowati and Riyadi, R. (2020) ‘Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore’, *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2), pp. 122–139. doi:<https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>.

- Saranenko, I.I. (2023) 'Experience in Using Strategic Analysis Tools in Determining the Efficiency of Agricultural Land Use', *Ecological Sciences*, pp. 117–124. doi:10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.19.
- Sari, N.P. and Nasution, R.D. (2021) 'Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Sistem Lelang Tanah', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(3). doi:10.36312/jisip.v5i3.2080
[/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index).
- Savira, A.N. and Wibawani, S. (2024) 'Transparency of Village Budget Management in Ngaban Village, Tanggulangin Sub-District, Sidoarjo Regency', *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), pp. 657–670.
- Seifollahi-Aghmiuni, S. *et al.* (2022) 'Urbanisation-driven Land Degradation and Socioeconomic Challenges in Peri-urban Areas: Insights from Southern Europe', *Ambio*, 51(6), pp. 1446–1458. doi:10.1007/s13280-022-01701-7.
- Sekarningrum, T. (2019) 'Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal dalam Badan Usaha Milik Desa', *Notaire*, 2(1), p. 111. doi:10.20473/ntr.v2i1.10261.
- Simanjuntak, B. and Manurung, R.K. (2023) 'Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun', *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), pp. 1–6. doi:<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3515>.
- Sinaga, E.P. and Rini, T.D. (2022) 'Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di

- Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), pp. 132–148. doi:10.47431/governabilitas.v3i2.215.
- Siska, F., Royani, E. and Widiyanti, S. (2024) ‘Pengaruh Pemberian Latihan Handgrip terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia Palembang’, *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*, 14(27), pp. 54–63. doi:<https://doi.org/10.52047/jkp.v14i27.296>.
- Soepandi, H. and Widodo, P.H. (2021) ‘Perancangan Sistem Informasi Pertanian Buku C Desa Berbasis Web di Desa Satriyan Kec.Tersono Kabupaten Batang’, *IC-Tech: Majalah Ilmiah*, 16(1), pp. 43–53. doi:<https://doi.org/10.47775/icttech.v16i1.150>.
- Subekti, R., Benedicta, S.J. and Imansyah, H.A. (2023) ‘Kedudukan Penguasaan Tanah dan Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Indonesia’, *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), pp. 214–231. doi:10.24970/bhl.v7i2.318.
- Suhascaryo, K.N. and Ilcham, A. (2023) ‘PKM Kelompok Ternak Berbasis Biogas sebagai Alternatif Energi Ramah Lingkungan untuk Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberarum D.I. Yogyakarta’, in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta “Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Era Society 5.0 sebagai Implementasi Bela Negara”*, pp. 369–376. doi:<https://doi.org/10.31315/psnpm.v8i1.11148>.
- Suparlan, O., Sugiyanto and Jati, M.P.W. (2024) ‘Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat’, *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3). Available at: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.

- Supriatna, A., Sihabudin, A.A. and Garis, R.R. (2023) 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran', *Journal Education and Government Wiyata*, 1(4), pp. 178–185. Available at: <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>.
- Surata, I.G. and Sena, I.G.A.W. (2022) 'The Effectiveness of Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as the Holder of Land Rights', *International Journal of Social Science and Business*, 6(4), pp. 621–632. doi:10.23887/ijssb.v6i4.51013.
- Suryoto *et al.* (2022) 'Perancangan Manajemen Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas', *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), pp. 310–316. doi:10.54259/pakmas.v2i2.1260.
- Susanto *et al.* (2021) 'The Role of Village Funds in Village Financial Independence (A Case Study in Jombang Regency)', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(1), pp. 32–40. Available at: <https://jiae.ub.ac.id/>.
- Syarifah, F. and Handayani, S.W. (2023) 'Legal Protection of Village Treasury Land in the National Land Law System', *Atlantis Press*, pp. 1043–1057. doi:10.2991/978-2-38476-164-7_97.
- Tanagar, D., Dewi, D.S.K. and Nasution, R.D. (2020) 'Kebijakan Penggunaan Tanah Desa (Bengkok) untuk Pendirian Warung Remang-remang', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), pp. 1–11. doi:10.32669/village.

- Tarigan, A.A. (2022) ‘Peran Copywriting Media Sosial dalam Meningkatkan Minat Konsumen Terhadap Produk West Burger’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, 2(3), pp. 1–10.
- Tentama, F., Mulasari, S.A. and Kusuma, D.R. (2017) ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Jerami dan Sekam Padi Menjadi Superkarbon di Kecamatan Moyudan, Sleman’, *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 2(2), pp. 119–126. doi:<https://doi.org/10.30653/002.201722.19>.
- Tilman, A., Aries Mujiburohman, D. and Dewi, R. (2021) ‘Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Riau Law Journal*, 5(1), pp. 1–13. Available at: <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>.
- Turner II, B.L., Lambin, E.F. and Verburg, P.H. (2021) ‘From Land-use/Land-cover to Land System Science’, *Ambio*, 50(7), pp. 1291–1294. doi:10.1007/s13280-021-01510-4.
- Umar, J. (2021) ‘Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), pp. 114–119. Available at: <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index-114->.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (1960).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (2014).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* (2012).

- Wahyuhana, R.T. *et al.* (2024) 'Potential Mapping and Zoning Division in the Development of Integrated Organic Areas in Kalurahan Patuk, Gunungkidul', *Community Empowerment*, 9(1), pp. 156–166. doi:10.31603/ce.10721.
- Wicaksana, G., Koenti, I.J. and Ethika, T.D. (2022) 'Implementasi Izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Kalurahan Sariharjo Ngaglik', *Jurnal Kajian Hukum*, 7(2), pp. 11–18.
- Wicaksono, H. and Sulistiyono, A. (2023) 'Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta', *Prosiding Nasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 2(1), pp. 147–154.
- Windirah, N., Mulyasari, G. and Yuliarso, M.Z. (2023) 'Pemanfaatan Teknik Tujuh Bentang dalam Mengidentifikasi Potensi Desa Sukasari Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu', *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), pp. 50–54. Available at: https://jurnalfkpm.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.
- Wirawan, F., Sutarni, N. and Hidayat, M.F. (2022) 'Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)', *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), pp. 140–152. doi:10.36596/jbh.v6i2.684.
- Wirawan, V. (2019) 'Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), pp. 161–171. doi:10.31289/jiph.v6i2.2989.

Yin, L. *et al.* (2021) 'Effects of Land-Use Intensity and Land Management Policies on Evolution of Regional Land System: A Case Study in The Hengduan Mountain Region', *Land*, 10(5). doi:10.3390/land10050528.

Yuliasari, E. (2022) 'The Implementation of Lease Agreements for Village Treasury/Cash Land by the Government', *Jurnal Konstaterring (JK)*, 1(3).